

## KURIKULUM

### PROGRAM PENDIDIKAN CIVICS UNTUK PENGUATAN POLITIK RAKYAT

#### I. PENDAHULUAN

Pendidikan civics untuk penguatan Politik rakyat adalah inisiatif yang digagas untuk membangun wacana dan wawasan kebangsaan, serta keterampilan perpolitikan yang memiliki nuansa *"people based oriented"* yang menghargai pluralitas kemasyarakatan dan mengutamakan kepentingan rakyat sebagai landasan terwujud *civil society*.

Latar belakang yang mendasari program ini adalah, bahwa 10 kebanyakan program latihan –selama ini—pada dasarnya diarahkan untuk menelaah aspek konseptual hak asasi manusia tanpa menjelaskan/mempertimbangkan faktor sosio-ekonomis dan politik.. 2) Program latihan dan kursus selama ini kebanyakan tidak mempertimbangkan kebutuhan aktual latihan para aktivis dan rakyat. Mereka kehilangan fleksibilitasnya untuk merancang, memodifikasi program yang memenuhi kebutuhan ini, 3) Kebanyakan pelatihan tidak untuk para aktivis, tetapi dirancang untuk mahasiswa kelanjutan atau profesional seperti penegak hukum, hakim, atau para guru.

Untuk mencapai tujuannya, program ini menekankan kepentingannya terhadap: 1) kebutuhan untuk melaksanakan program-program pelatihan secara teratur pada tingkat regional guna memenuhi kebutuhan lokal di suatu daerah, 2) kebutuhan yang mendesak guna mengembangkan program-program latihan bagi para trainer, 3) mendorong komunitas lokal yang disasar –pada nantinya—untuk mengorganisasikan dirinya, baik dalam kelompok, badan keswadayaan masyarakat, maupun kelompok fungsional lainnya.

Mengingat sifat program sebagaimana diuraikan di atas, maka para implementor program disamping memiliki ketrampilan sebagai fasilitator, juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang materi, instrumen analisa, sasaran subyek, prinsip, dan issue yang menjadi perhatian guna keberhasilan program. Untuk ini perlu adanya Workshop "Pemetaan Kebutuhan Materi" secara tepat waktu dan tepat kualitas.

#### II RUANG LINGKUP PEMETAAN KEBUTUHAN

1. Struktur politik: tatanan interaksi-interaksi dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melakukan pengaturan-pengaturan dalam kehidupan bersama. Berkaitan dengan struktur politik ini adalah pola-pola dan cara-cara pengambilan keputusan, keterkaitannya dengan kebijakan negara, termasuk didalamnya adalah sistem politik Indonesia.
2. Struktur Ekonomi: tatanan interaksi-interaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam artian pengaturan sumber daya dan keterkaitannya dengan kebijakan negara.
3. Struktur sosial: Tatanan interaksi-interaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keakraban antar orang maupun antar kelompok.

4. Struktur budaya: tatanan interaksi-interaksi dalam hubungannya dengan yang ilahi, standart tingkah laku, interaksi dalam pengatur hak dan kewajiban individu, sanksi, dasar dan arah interaksi.
5. Hak Asasi Manusia: tatanan interaksi-interaksi dalam hubungannya dengan sesama manusia sebagai individu maupun kelompok, serta interaksi dalam pengaturan yang mempunyai keterkaitan dengan kebijakan negara, pemerintahan, budaya, dan interaksi sosial.
6. Gender : tatanan interaksi –interaksi sosial dalam masyarakat maupun negara dengan prinsip kesetaraan
7. Lingkungan

#### **Instrumen Analisis**

Dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan kelanjutan pendidikan civics ini, perlu beberapa persoalan utama yang menjadi keprihatinan. Hal ini ditujukan untuk membantu kemudahan dalam mempersiapkan proses perencanaan dan implementasi kegiatan pendidikannya. Untuk memenuhi prasyarat tersebut diperlukan adanya instrumen, yang meliputi:

1. Pemerataan
2. Solidaritas sosial
3. Kontrol sosial
4. Kelestarian lingkungan
5. Keadilan gender
6. Hak Asasi manusia.
7. Vokasional

#### **Kelompok sasaran**

Sesuai dengan tujuan yang melatar belakangi program pendidikan civics ini, yaitu membangun wacana dan wawasan kebangsaan, serta ketrampilan perpolitikan yang memiliki nuansa "*people based oriented*" (berorientasi pada basis rakyat) yang menghargai pluralitas, maka kelompok sasaran yang dituju meliputi :

1. Mahasiswa
2. Pemuda
3. Buruh transportasi
4. Petani
5. Komunitas pesantren

#### **Pendekatan Prinsip**

Salah satu metodologi yang dipakai dalam Program Pendidikan Civics ini adalah: Pendekatan Musyawarah, yakni suatu model pendekatan pendidikan orang dewasa yang diterapkan dalam kegiatan belajar bersama, yang materi utamanya ialah permasalahan, pengalaman, dan kearifan yang ada pada rakyat. Untuk mendukung penerapan metode ini, akan dipakai unsur-unsur pendekatan prinsip, yang meliputi:

- Mengutamakan yang terabaikan
- Pemberdayaan (penguatan ) masyarakat.
- Masyarakat sebagai pelaku . orang luar sebagai fasilitator
- Saling belajar dan menghargai perbedaan

- Orientasi praktis
- Prinsip berkelanjutan dan selang waktu
- Belajar dari kesalahan
- Terbuka

Issue yang menjadi perhatian

1. Dinamika kehidupan politik
2. Restrukturisasi partai-partai, legislatif, sistem peradilan, dan kebebasan pers.
3. Dealiranisasi
4. Peran militer dalam politik Indonesia
5. Koorporatisme dan represitas negara
6. Kooptasi dan hegemoni negara atas rakyat sipil
7. Kebijakan pokok ekonomi dan implikasinya
8. Pemilik modal sebagai kekuatan utama
9. Kemunculan konglomerasi
10. Realitas kesenjangan ekonomi (miskin-kaya, desa-kota, daerah – pusat)
11. Urbanisasi dan pengangguran
12. Birokrasi dan fenomena kolusi korupsi
13. Pengertian prinsip dasar, model, dan fungsi sosial
14. Proses pelapisan sosial, politik dan ekonomi
15. Penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial
16. Paradigma dan tinjauan kritis realitas perubahan sosial
17. Kebijakan dibidang sosial budaya
18. Sistem pendidikan nasional
19. Pendangkalan formalisasi agama dan seni budaya
20. Mobilisasi simbol-simbol agama dan kebudayaan untuk politik
21. Represi negara terhadap struktur budaya
22. Pluralitas (agama, etnik, suku, antar golongan) dan perlawanan kultural.

## 1. PEMUDA

THEMA : INTER KORELASI DAN IDEOLOGISASI SOCIETY - STATE

Interaksi berbagai kelompok masyarakat dan masuknya pengaruh asing di Indonesia abad ke dua belas sampai sekarang masih berproses menuju kematangan sebagai bangsa yang mampu mengelola negara. Dengan demikian tata nilai akan ditentukan oleh dinamika dalam negeri dan luar negeri. Dinamika itu antara lain perubahan struktur penduduk dan struktur ekonomi, lembaga peradilan, homogenisasi dalam semua aspek kehidupan bernegara, sistem politik dan hukum nasional.

## Tujuan Umum

### A. Politik Indonesia Kekinian : Sistem, Struktur dan Nilai

#### Tujuan Khusus :

- Mengetahui sistem dan struktur politik nasional yang dikembangkan di Indonesia.
- Mengetahui fungsi, peran dan posisi Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif dalam konsepsi Trias Politika
- Mengetahui pengertian, sistem dan prinsip negara demokrasi modern dan pengertian, sistem dan prinsip negara demokrasi ala Indonesia (demokrasi Pancasila), dan hubungannya antara warganegara, pemerintah dan negara.
- Mengetahui konsepsi filosofis demokrasi : dari, oleh dan untuk rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.
- Mengetahui asas kebijakan publik sebagai interest kepentingan yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
- Mengetahui bahwa undang-undang merupakan produk manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu.

### B. Peran dan Politik Pemuda

#### Tujuan Khusus :

- mengetahui akar filosofis dan historis pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.
- Mengetahui peran posisi kesejarahan pemuda didalam panggung politik lokal dan nasional.
- Mengetahui pentingnya pengetahuan dan sikap politik sebagai alat untuk memahami kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam dinamika kelompok-kelompok masyarakat.
- Mengetahui peranan politik kepemudaan sebagai perangkat untuk penegakan hak-hak dasar masyarakat.
- Mengetahui

### C. Pemuda dan Organisasi

#### Tujuan Khusus :

- mengetahui bahwa organisasi sebagai sarana untuk menciptakan kontrol sosial untuk terwujudnya demokrasi dan penegakan hak.
- Mengetahui hak-hak untuk berorganisasi sebagai ekspresi kebebasan pemuda yang aktif dan dinamis.
- Mengetahui perspektif pemuda sebagai kekuatan yang secara sosial-politik mempunyai potensi mengorganisir.

## **II. EKONOMI**

Tujuan Umum :

### **A. "Kebijakan Ekonomi Nasional"**

Tujuan khusus:

- a. Mengetahui tatanan dan relasi perekonomian nasional dengan internasional, kebijakan perekonomian nasional-internasional beserta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.
- b. Mengetahui implikasi sistem perekonomian terpusat yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi kaya-miskin di masyarakat.

## **III. SOSIAL**

Tujuan Umum:

- a. Memahami struktur sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan negara serta segmen-segmen di dalamnya.
- b. Memahami problem sosial di perkotaan. Urban

### **A. "Pemuda dalam Tatanan Sosial Masyarakat Kota"**

Tujuan khusus:

- a. Mengetahui nilai dan sikap dasar masyarakat urban yang dinamis.
- b. Mengetahui tatanan masyarakat urban dan industrialisasi beserta dampaknya terhadap munculnya pengangguran.
- c. Mengetahui kebijakan publik di perkotaan yang memunculkan fragmentasi di masyarakat; memunculkan ketimpangan-ketimpangan sosial.

### **B. "Pemuda dan Perubahan Sosial"**

- a. Mengetahui proses

## **BUDAYA**

Budaya merupakan seperangkat tata-nilai yang berkembang hidup dalam masyarakat dan dipakai sebagai nilai-nilai yang menjadi landasan manusia dan masyarakat

### **A. "Pemuda dan**

#### **IV Lingkungan**

Tambahan Kebijakan politik, sosial, budaya dan implikasinya yang berpengaruh pada lingkungan

## V HAM

### Tujuan umum

- a. Memahami HAM merupakan fitrah dasar manusia yang harus pada diri setiap manusia.
- b. Memahami HAM adalah nilai-nilai Universal.

### “Citra Pemuda dan HAM”

Tambahan deklarasi semesta HAM; HAM dalam politik dan sipil; HAM dalam sosial, ekonomi, dan budaya.

### VI. Gender.

1. Marginalisasi
2. Sub ordinasi dan Diskriminasi
3. Stereotip
4. Kekerasan
5. Beban/peran ganda.

## MAHASISWA

### A. POLITIK

#### 1. “Sistem politik Indonesia”

Sub pokok bahasan:

- a. Sistem politik
- b. Prinsip demokrasi
  - a. Pemisahan Kekuasaan
    - a.1. Yudikatif, eksekutif, legislatif.
    - a.2. Pusat – daerah (otonomi Daerah)
    - a.3. Negara masyarakat.
  - b. Prinsip rakyat berdaulat
    - b.1. Pilar penopang I = partai politik
    - b.2. Pilar penopang II = organisasi masyarakat dan pers.
  - c. Sistem perundang-undangan
    - c.1. UUD 1945
    - c.2. 5 paket UU politik

tujuan :

- a. peserta mengetahui dan memahami tentang sistem politik Indonesia.
- c. peserta memahami dan sadar akan prinsip-prinsip demokrasi
- d. Peserta bersikap kritis terhadap undang-undang tersebut

Out put

1. mengetahui tentang sistem politik Indonesia
2. Kesadaran dan prinsip-prinsip demokrasi
3. Mengetahui dan kritis terhadap Undang-undang yang ada.

2. Militer dalam kehidupan bernegara.
  - A. Peran militer (dwi fungsi ABRI)
  - B. Sistem militerisme
  - C. Kooptasi aparat.

Tujuan:

1. Peserta mengetahui dan mampu bersikap kritis terhadap dwi fungsi ABRI.
2. Peserta menyadari akan bahaya militerisme
3. Peserta mengetahui dan menyadari bentuk-bentuk kooptasi aparat.

Output

1. Sikap kritis terhadap Dwi fungsi ABRI
  2. Kesadaran akan bahaya militerisme
  3. Mengetahui dan menyadari bentuk-bentuk kooptasi aparat.
3. Sistem pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi.
    - a. Nilai dasar
    - b. Peran dan dinamika
    - c. Kampus dalam sistem politik
    - d. Kurikulum pendidikan.

B. BUDAYA

1. Budaya akademis:
  - a. suasana dialogis dan argumentatif
  - b. Konservatisme, feodalisme, militerisme dan paternalistik
  - c. Pandangan dosen lebih pintar dari mahasiswa.
2. Identifikasi Nilai dan perilaku
  - a. Historikal
  - b. Turunan nilai eksternal (Stereotip)

C. EKONOMI

1. "Sistem Ekonomi Indonesia"
  - Pokok bahasan
    - a. Sistem ekonomi Indonesia
    - b. Monopoli, oligopoli, konglomerasi.
    - c. Pengaruh globalisasi pada ekonomi Indonesia.

Tujuan

- a. Peserta mengetahui Sistem ekonomi Indonesia
- b. Peserta mengetahui dampak dari sistem ekonomi Indonesia, monopoli, oligopoli, konglomerasi.
- c. Peserta mengetahui pengaruh globalisasi perekonomian Indonesia.

Output:

- a. Pengetahuan sistem ekonomi Indonesia.
  - b. Pengetahuan tentang monopoli, oligopoli, klonglomerasi
  - c. Pengetahuan pengaruh globalisasi.
  - d. Pengetahuan pada perekonomian Nasional.
2. Sistem Pembangunan ekonomi Indonesia.
- a. Sistem ekonomi Indonesia: Pembangunan ekonomi dan dampak pembangunan ekonomi.
  - b. Monopoli, oligopoli, klonglomerasi.
  - c. Pengaruh globalisasi pada ekonomi Indonesia.

D. HAM

1. "HAM dalam pendidikan tinggi"

Pokok bahasan:

- a. Hak memperoleh pendidikan
- b. Hak untuk berorganisasi tanpa
- c. Hak untuk bebas berpikir, meyakini serta beragama
- d. Hak untuk berkumpul dan berserikat
- e. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat
- f. Hak untuk jaminan sosial
- g. Hak sosial politik
- h. Hak untuk memilih
- i. Hak untuk membebaskan diri dari semua bentuk tekanan
- j. Hak untuk berorganisasi
- k. Hak untuk berkumpul
- l. Hak untuk kebebasan bergerak
- m. Hak untuk meyakini sesuatu (politik, agama, peribadatan dst)
- n. Hak sosial ekonomi dan kultural
- o. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- q. Hak untuk mendapatkan kesamaan derajat kelamin
- r. Hak untuk memperoleh kesempatan dalam pendidikan

E. SOSIAL

1. Transformasi sosial

Pokok bahasan

- a. Kesenjangan sosial
- b. Perubahan sosial
- c. Peran, fungsi, posisi sosial mahasiswa
- d. Agen of change.

Tujuan

- a. Peserta mengetahui tentang ada kesenjangan sosial dan dampak-dampak yang akan terjadi
- b. Peserta mengetahui dan mengkritisi perubahan sosial dan apa yang harus dilakukan

Output.

- a. Pengetahuan akan dampak-dampak kesenjangan sosial
- b. Mengkritisi perubahan sosial, apa yang harus dilakukan.

VI. Gender.

1. Marginalisasi
2. Sub ordinasi dan Diskriminasi
3. Stereotip
4. Kekerasan
5. Beban/peran ganda.

PETANI

I. POLITIK

Politik Agraria

Tujuan

- peserta mampu memahami hukum dan politik pertanahan di wilayahnya

Output

- Mampu menggambarkan dan menguraikan tentang hukum pertanahan, politik
- Mampu menyelesaikan konflik pertanahan
- Peta dan kelembagaan tentang agraria

Pokok bahasan

- a. Negara agraris
- b. Hak petani atas tanah
- c. Kebijakan industrialisasi (penggusuran).
- d. Campur tangan atau pemaksaan militer urusan pertanahan

1. "Posisi tawar petani"

Tujuan

1. Peserta mampu memahami potensi dirinya sendiri sebagai komunitas
2. Peserta memahami pentingnya berorganisasi atau perkumpulan

Output

1. konsolidasi internal
2. memetakan kemampuan sendiri.

Pokok bahasan

- a. Tranparansi kebijakan pertanian
- b. Organisasi petani (pewadahan tunggal dan OTL (hak berorganisasi)
- c. Hak memperoleh lahan
- d. Hak menanam tanaman

- e. Memakai atau menggunakan pupuk
  - f. Hak menikmati hasil panen
  - g. Penguatan jaringan
3. Revolusi hijau dan implikasinya
- Tujuan
- Peserta memperoleh pengetahuan, tentang pengaruh industrialisasi dalam pertanian.
- Output.
1. gambaran tentang keadaan, komunitas dan relevansinya
  2. Peta sumber daya dan lingkungannya
  3. Instrumen (institusi) yang mendukungnya.
  4. Sikap terhadap realitas tersebut.
- Pokok Bahasan
1. Dampak revolusi hijau
  2. Intensifikasi tanaman, pupuk kimia, bibit unggul, pemgairan, pengendalian hama, teknologi pertanian.
  3. Kebijakan industrialisasi (pengusuran)
  4. Inpor beras/ harga beras murah

#### BUDAYA

Nrimo dan memegang adat  
Tambahkan : Arus modern, gotong royong dan ulet.

#### SOSIAL

Strata sosial dalam pertanian/ petani  
Strata sosial dalam masyarakat/negara  
Revolusi hijau terbawa arus modern.  
Tambahkan : Nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat petani

#### EKONOMI

Pokok bahasan

1. posisi petani sebagai produsen (penghasil bahan pokok)
2. pemasaran hasil-hasil pertanian
3. Modal untuk pertanian
4. Tatanan jalur distribusi (pemasaran, nilai tawar, jaringan pemasaran)

Tambahan Modal untuk rakyat.

## F. HAM

### 2. "deklarasi semesta HAM :"

Pokok bahasan:

Semesta ham

1. Hak untuk sama dimuka hukum
2. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat
3. Hak untuk berkumpul dan berserikat
4. Hak untuk atas penghidupan yang layak
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Ham politik dan sipil

1. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum
2. Hak untuk memilih
3. Hak untuk membebaskan diri dari semua bentuk tekanan
4. Hak untuk berorganisasi
5. Hak untuk meyakini sesuatu (agama, politik, peribadatan)
6. Hak untuk memperoleh peradilan yang cepat menyeluruh dan murah.

HAM sosial, ekonomi, kultural.

1. Hak untuk mendapat jaminan sosial
2. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan
3. Hak untuk memperoleh kebebasan dari segala bentuk diskriminasi
4. Hak untuk memperoleh kesempatan pendidikan

GENDER.

1. Marginalisasi
2. Sub ordinasi dan Diskriminasi
3. Stereotip
4. Kekerasan
5. Beban/peran ganda.

Lingkungan .

Kebijakan politik sosial, budaya dan implikasinya yang berpengaruh pada lingkungan.

PESANTREN

A.POLITIK

I. Hak, kewajiban serta kebijak dalam perburuhan transportasi

Tujuan

1. Memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban buruh transportasi
3. memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kebijaksanaan dalam perburuhan transportasi.
4. Memberikan gambaran tentang pihak-pihak yang terkait dengan kebijaksanaan perburuhan transportasi.
5. Memberikan gambaran pola hubungan dalam perburuhan transportasi

#### Output

1. Peserta memahami dan mengetahui hak dan kewajiban buruh transportasi
2. Peserta mengetahui dan memahami serta mengkritisi kebijakan dalam perubahan transportasi

#### Pokok bahasan

- a. Hak dan kewajiban buruh
    1. Hak mendapat penghasilan yang layak
    2. Hak mendapat pengetahuan dan informasi
    3. Pengetahuan akan hak-hak politik
    4. Persoalan peradilan
    5. Kewajiban buruh terhadap perusahaan
  - b. kebijakan perubahan transportasi.
    1. Hubungan buruh dengan perusahaan
    2. Birokrasi pengurusan kecelakaan (hukum, jaminan sosial)
    3. Penataan jalur atau trayek
    4. Penataan jumlah armada atau angkutan
    5. Tabel waktu pemberangkatan
    6. UU lalulintas
    7. Intervensi atau intimidasi serta keperpihakan militer terhadap perusahaan dalam urusan transportasi.
    8. Perilaku aparat militer di dalam angkutan (khususnya Bus)
- Tambahan
1. Hak, kewajiban dan kebijakan dalam perubahan transportasi
    - a. Hak dan kewajiban buruh
    - b. Kebijakan perubahan transportasi
  2. Kebijakan dalam bidang organisasi buruh transportasi

#### BUDAYA

##### Prilaku dalam perubahan transportasi

1. Nilai yang berkembang atau yang dikembangkan
  2. Kebut-kebutan
  3. Kernet ingin menjadi pengemudi
- Hubungan antara majikan dan buruh transportasi
1. Kesenjangan antara majikan dan buruh transportasi
  2. Nilai yang berkembang dan dikembangkan dalam hubungan buruh transportasi
- Tambahan
1. Budaya suap
  2. Feodalisme (hubungan majikan atas buruh)

#### EKONOMI

1. Transportasi sarana penting dalam realitas ekonomi
  - a. Transportasi adalah alat vital
2. kesejahteraan ekonomi buruh transportasi
  - a. Berkurangnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan buruh transportasi

b. Modal

Tambahan :  
Jaminan Kesejahteraan ekonomi (termasuk kesehatan)

SOSIAL

1. Sarana transportasi dalam mobilitas sosial
    - a. memberikan pelayanan yang baik
- Tambahan: Toleransi antar buruh transportasi

HAM

Deklarasi semesta HAM

1. Hak Untuk bebas mengeluarkan pendapat.
2. Hak Untuk mendapat jaminan yang baik
3. Hak Untuk mendapatkan pendidikan

Hak politik dan sipil

1. Hak Untuk mendapat perlakuan yang sama didepan hukum
2. Hak Untuk membebaskan diri dari ancaman
3. Hak Untuk Membebaskan diri dari segala bentuk tekanan
4. Hak Untuk menyatakan pendapat
5. Hak Untuk kebebasan bergerak.
6. Hak Untuk meyakini sesuatu (politik, agama, adat istiadat)
7. Hak Untuk mendapat pembelaan

Hak ekonomi budaya

1. Hak Untuk mendapat jaminan sosial
2. Hak Untuk mendapat pelayanan kesehatan
3. Hak Untuk kesamaan derajat kelamin
4. Hak Untuk memperoleh kebebasan dari segala bentuk diskriminasi
5. Hak Untuk memperoleh kesempatan dalam pendidikan

LINGKUNGAN

Kebijakan politik, sosial ekonomi, budaya dan implikasinya yang berpengaruh pada lingkungan

1. VI. Gender.
6. Marginalisasi
7. Sub ordinasi dan Diskriminasi
8. Stereotip
9. Kekerasan
10. Beban/peran ganda.

## PESANTREN

### POLITIK

- I. Politik dalam pola hubungan kekuasaan  
Pokok bahasan
  1. Struktur dan pola hubungan kekuasaan di pesantren
    - a. Hegemoni Kyai dan sikap paternalistik
    - b. Peran politik hanya dimainkan kyai
    - c. Sering terjadi tekanan dan sulit menerima perubahan
  2. Posisi pesantren dengan partai politik]
    - a. tidak berpolitik praktis
    - b. Aspirasi pesantren disalurkan lewat parpol
  3. dampak-dampak politik bagi kehidupan pesantren
    - a. Mudah diarahkan
    - b. Dealiranisasi
  4. Peran pers bagi pesantren
    1. Pemberitaan media massa tentang pesantren
    2. Terbatasnya informasi di lingkungan pesantren (santri)
  5. Penguatan Organisasi di lingkungan pesantren
    1. Organisasi santri, hubungan dengan kekuasaan kyai.
    2. Perluasan jaringan organisasi di tingkat santri

#### Tambahan.

1. Pembongkaran nilai-nilai (Syura, adalah, imamah, umarto', umamah, insaniah; dst)

### EKONOMI

1. Kebijakan ekonomi Indonesia  
Pokok bahasan
  1. realitas kesenjangan ekonomi (desa-kota)
  2. pengelolaan lembaga ekonomi produktif  
tambahan.(kesenjangan antar pondok pesantren.  
Nilai-nilai ajaran tata ekonomi Islam
    1. Muzaro'ah, rihanah, salam, musarokah
    2. Riba dan bank

### SOSIAL

#### Pokok bahasan

1. fungsi dan peran sosial
  1. Interaksi pesantren di masyarakat
  2. Integritas dan nilai-nilai sosial
  3. Fungsi sosial pesantren

#### 4. Pembongkaran nilai-nilai ajaran yang memiliki implikasi sosial

##### Tambahan

1. Tajjaddid (pembaharuan), taqlid, persatuan/ukhuwah (basyariyah, wathoniyah, islamiyah)

##### BUADAYA

###### Sistem nilai dan budaya

- a. sistem nilai yang berkembang di lingkungan pesantren (taat, patuh dan tawadhuk, paternalistik, bertobat, kuat/su'ul adab)
- b. sistem di pondok pesantren

##### Tambahan

1. Sistem di pondok pesantren monologis (ssorokan, tradisional; semi modern; modern.
2. Hubungan perilaku diantara para santri (gaya hidup, tatanan pergaulan)

##### HAM

###### 1. Deklarasi semesta Ham

1. Hak untuk sama di muka hukum
  2. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat]
  3. Hak untuk berkumpul dan berserikat
  4. Hak untuk bekerja, memilih dengan bebas jenis pekerjaannya
  5. Hak untuk mendapatkan pendidikan
2. Hak politik dan sipil
    1. Hak untuk memilih
    2. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum
    3. Hak untuk membebaskan diri dari semua bentuk tekanan
    4. Hak untuk berkumpul
    5. Hak untuk menyatakan pendapat
    6. Hak untuk kebebasan bergerak
    7. Hak untuk meyakini sesuatu (agama, Politik, peribadatan)
    8. Hak untuk memperoleh peradilan yang cepat, menyeluruh dan murah
3. HAM dalam Islam
    1. Hak untuk bebas dari eprbudakan, penindasan, penghinaan aatau eksploitasi
    2. Hak untuk pemilikan yang sah
    3. Hak untuk pelayanan sosial dan media
    4. Hak untuk mencari keadilan
    5. Hak untuk berpendapat secara bebas dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
    6. Hak untuk mendapatkan informasi
    7. Hak untuk ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam pengaturan kepentingan umum negaranya
    8. Hak untuk melindungi kepentingan modal dan material.

- VI. Gender.
1. Marginalisasi
  2. Sub ordinasi dan Diskriminasi
  3. Stereotip
  4. Kekerasan
  5. Beban/peran ganda.